

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA  
BATU  
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:  
ALPRIN TAY LANDUPARI  
2017210193**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara dengan semboyan bhinneka tunggal ika, dan Pancasila sebagai dasar negara, untuk itu dalam memantun perkembangan sektor baik baik industri serta lain- lain perluaadanya pemerataan perkembangan pada tiap sektor baik pendidikan, ekonomi, sosial, pengusaha kecil, ataupun warga golongan dasar semacam Pemulung, anak terlantar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani masalah- masalah sosial, masih banyak mempunyai hambatan berbagai hal. dalam penyaringan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan sosial tidak mencakup secara merata warga yang terdapat di Kota Batu dan Dinas Sosial Kota Batu jadi lokasi utama penelitian ini buat melihat lebih jauh upaya yang dicoba Dinas Sosial Kota Batu dalam kurangi jumlah masalah- masalah sosial. Kualitatif dengan analisis deskriptif, sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, analisis data memakai kajian *purposive sampling*. Dimana bersumber pada hasil analisis memakai teori George Edward III, ialah poin komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Membuktikan kalau Implementasi kebijakan terhadap Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Batu, sudah diterapkan sesuai rule kebijakan yang terdapat, baik dari poin komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

**Kata Kunci: Implementasi, Pembinaan, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada nilai- nilai dasar pancasila, di mulai dengan “Ber-Tuhan” yang merupakan pengamalan akan sila pertama pancasila, “Berempati-Manusia” sebagai bentuk pengamalan akan sila ke 2 pancasila, “Bersatu” perwujudan akan sila ke 3 pancasila, “Demokrasi Perwakilan” sebagai bentuk perwujudan sila ke 4 pancasila, dan yang terakhir yang tidak kalah berarti dari ke 4 sila sebelumnya ialah “Adil Sosial” yang ialah pengamalan hendak sila ke 5.

Khusus untuk sila ke 5 pancasila tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dikatakan dalam wesbite resmi kemensos.go id pada 18 November 2020 bahwa tiap sektor baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik harus terletak pada taraf yang merata, dan adil untuk tiap orang, baik dari masyarakat kalangan atas (Pejabat publik, pejabat swasta, serta pengusaha- pengusaha non privat), masyarakat golongan menengah semacam PNS (Pegawai Negara Sipil), pekerja sosial, pengusaha-pengusaha kecil, ataupun warga golongan kecil seperti Pemulung, anak terlantar, dll.

Di lansir dari tirta. id pada 20 November 2020, mengatakan selain pada sila Ke-5 pancasila, dalam pembukaan undang- undang bawah 1945 alinea ke 4 juga mempertegas terkait keadilan sosial, oleh sebab itu keadilan sosial jadi salah satu patokan utama asas dasar Negara Republik Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia baik dari golongan atas hingga golongan menengah kebawah senantiasa dalam tanggung jawab pemerintah Indonesia, pemerataan hak- hak hidup, hak- hak menerima pendidikan yang layak, serta hak- hak lain harus disetarakan tanpa terdapatnya perbedaan posisi yang signifikan. untuk mengimplementasikan hal tersebut pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk tetap melindungi dan bersikap adil pada masyarakat kalangan menengah kebawah seperti anak-anak ter-lantar, anak-anak jalanan, pengemis, pemulung dll.

Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat 1 berbunyi“ Fakir miskin serta anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Fakir miskin yang disebut dalam undang- undang dasar tersebut meliputi, anak jalanan, pemulung, pengamen, serta warga yang mempunyai pemasukan tetapi tidak lumayan buat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Pemeliharaan Fakir miskin oleh Negara sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial seperti yang tertuang dalam sila ke- 5 Pancasila serta Pembukaan UUD 1945 alinea Ke- 4.

Permasalahan- Permasalahan sosial umum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, upaya- upaya menekan jumlah permasalahan akibat kasus sosial kerab kali dicoba pemerintah dengan menghasilkan bermacam kebijakan- kebijakan terkait dengan hal tersebut, seperti dikeluarkannya undang- undang terkait kesejahteraan sosial yakni Undang- Undang No. 11 Tahun 2009, mengamanatkan negara untuk memberikan keadilan sosial untuk warga negara serta kehidupan yang secara layak serta bermartabat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemamfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, serta keberlanjutan, dan permasalahan-permasalahan sosial terkait kesejahteraan sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menanggulangi masalah- masalah sosial terkait kriminalitas, pemerintah Indonesia pula membuktikan keseriusannya dalam menanggulangi permasalahan sosial dengan diperkuatnya aparat penegak hukum.

Di lansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 Provinsi Jawa Timur ialah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia juga tidak luput dari bermacam permasalahan sosial yang di hadapi, Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk mencapai 39,74 Juta jiwa dengan tingkatan kasus sosial menggapai 634.380 jiwa dengan presentase 1,59%. ini menunjukkan lembaga pemerintah wajib menyoroti masalah-masalah sosial yang tidak terdapat ujung pangkalnya seperti anak jalanan, anak terlantar, dll.

Dalam website resmi Dinas Sosial Kota Batu pada 18 November 2020 di jelaskan Dinas Sosial (Dinsos) sebagai organisasi publik yang mempunyai kewenangan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial, agar

menurunnya tingkat permasalahan sosial di Indonesia. Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial merupakan program upaya penanggulangan permasalahan-permasalahan sosial yang dilakukan oleh Dinsos Kota Batu seperti yang misinya adalah “Meningkatkan Mutu serta Kuantitas Pembinaan PMKS”, PMKS (Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial) ialah merupakan salah satu program yang terbuat dalam merealisasikan keadilan sosial. Program yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ditangani oleh Bidang PMKS yaitu peningkatan kesejahteraan sosial untuk warga yang mempunyai permasalahan-permasalahan sosial. Kota Batu sendiri merupakan Kota di Jawa Timur dengan tingkat Kasus Sosialnya relatif rendah dibandingkan kota-kota lain yang terdapat di Jawa Timur, tetapi informasi statistik membuktikan kenaikan dari 2017-2019 secara berturut-turut (145, 170, 180).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani masalah-masalah sosial, masih banyak mempunyai hambatan berbagai hal, hal ini dapat kita amati dalam artikel SuryaMalang.com pada 18 November 2020 dimana Contohnya dalam penyaringan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan sosial tidak mencakup secara merata warga yang terdapat di Kota Batu, sehingga peneliti tertarik meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Batu” dan Dinas Sosial Kota Batu menjadi lokasi utama peneliti ini untuk melihat lebih jauh upaya yang dicoba Dinas Sosial Kota Batu dalam kurangi jumlah masalah-masalah sosial.

Sedangkan Dinas Sosial Kota Batu di jelaskan lebih lanjut dalam malangvoice.com pada 18 November 2020 belum mempunyai tempat khusus bagi rehabilitasi untuk gelandangan, pengemis serta anak jalanan sampai saat ini. Oleh sebab itu pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial bergerak cepat untuk membangun tempat shelter ataupun tempat penampungan anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis, kendala jiwa, serta lanjut umur. Dengan terdapatnya kebijakan pembuatan shelter ataupun penampungan Pemerintah Kota Batu oleh Dinas Sosial sanggup menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah penentu mengenai bahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Ada pun rumusan masalah dari peneliti ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan dalam Pembinaan permasalahan Sosial khususnya untuk Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Batu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Pembinaan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Batu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai ataupun dituju dalam suatu penelitian. Hingga tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui kebijakan pembinaan Penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Batu
2. Memahami faktor penghambat dan pendukung dalam Pembinaan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Batu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dilakukan oleh penelitian tentang “Kebijakan Pembinaan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Batu” ialah:

1. Manfaat Praktis
  - a. Peneliti: penelitian di harapkan dapat memperluaskan pengetahuan peneliti serta jadi masukan untuk mahasiswa Administrasi Publik buat mempersiapkan diri terjun ke-dunia kerja.
  - b. Bagi instansi: peneliti ini di harapkan memberikan sumbangan tentang pemahaman pembinaan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Autowriten. 2019. Dinas Sosial Kota Batu. Diakses pada 18 November 2020
- Autowriten. 2020. butir butir pengamalan pancasila sila ke 5 arti, nilai serta isinya. <https://tirto.id/butir-butir-pengamalan-pancasila-sila-ke-5-makna-nilai-isinya-f49W> diakses pada 20 November 2020
- Bryson, John Meter. 2004. Perencanaan Strategis Untuk Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmoko. 2019. Kota Batu Dibanjiri Anak Jalanan serta Pengemis Ini Upaya serta Kemauan Dinas Sosial. <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/02/kota-batu-dibanjiri-anak-jalanan-dan-pengemis-ini-upaya-dan-keinginan-dinas-sosial>. diakses pada 18 November 2020
- David, R. 2009. Manajemen Strategis. Jakarta. Salemba 4. Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Sosial serta Tenaga Kerja. 2017. [www.kuningankab.go.id/sosial-kemasyarakatan/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks](http://www.kuningankab.go.id/sosial-kemasyarakatan/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks)
- Halim, Devinba 2020. Kompas. com. Dalam Sepekan Polri Catat, Kenaikan Kejahatan Dijalanan. Diakses: 08 September 2020
- Hmz. 2019. Dinas Sosial Kota Batu Belum Memiliki Tempat Spesial buat Rehabilitasi PMKS. Diakses pada 18 November 2020
- Keban, Yeremias. 2014. 6 Ukuran Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media Kuncoro
- Maryani. 2014. Anhyjumriani. blogspot. com. Anak Jalanan. <http://anhyjumriani.blogspot.com/2014/01/anak-jalanan.html>
- Miles B. Matthew, dkk. 2014. Qualitative Informasi Analisis. London: SAGE Publications.
- Moleong, J Lexy. 2009. Tata cara Riset Kualitatif. Bandung: PT. Anak muda Rosdakaya.
- Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: UGM Press

- Purwanto, Iwan. 2006. Manajemen Strategi. Bandung. Yrama Widia. Salusu. 2005. Pengambilan Keputusan Strategik Buat Organisasi Publik serta Organisasi Non Profit. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raditya, Iswara N. 2020. Tirto. id. Butir- Butir Pengalaman Pancasila Sila Ke- 5, Arti, Nilai serta Isinya
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance. Bandung: Mandar Maju.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media
- Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Strategik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, serta Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarweni, V, Wiratna. 2014. Tata cara Riset: Lebih Lengkap, Instan, serta Gampang. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyanto, Bagong. 2013. Permasalahan Sosial Anak. Bandung. [https:// journal.unismuh. ac. id/ index. php/ equilibrium/ article/ view/ 500](https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/500)
- UU Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Wahab, Abdul 2008. Analisis Kebijakan dari perumusan ke implementasi kebijaksanaan negeri. Jakarta: Bumi Aksara